



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi realisasi anggaran antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja kode (.....), dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)..... kode (.....).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data realisasi Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2011 dengan hasil sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan hasil rekonsiliasi ini menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kepala KPPN.....

KPA Satuan Kerja

NIP

NIP

16/9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CARA PENGISIAN
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 berisi informasi mengenai pagu, realisasi dan sisa dana kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 dengan cara pengisian sebagai berikut :

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan Nomor SP DIPA
(2)	Diisi dengan Kode Satker dan uraian Satker
(3)	Diisi dengan Nomor Urut
(4)	Diisi dengan Kode Program
(5)	Diisi dengan Kode Kegiatan
(6)	Diisi dengan Kode Output
(7)	Diisi dengan Kode Sumber Dana
(8)	Diisi dengan Uraian Program
(9)	Diisi dengan Uraian Kegiatan
(10)	Diisi dengan Uraian Output
(11)	Diisi dengan Uraian Sumber Dana
(12)	Diisi dengan Nomor Register
(13)	Diisi dengan Kota dan Tanggal
(14)	Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
(15)	Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
(16)	Diisi dengan Nama Kepala KPPN
(17)	Diisi dengan NIP Kepala KPPN

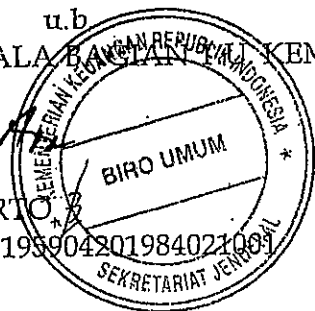
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BANGUNAN KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 1959042019840210091



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN II
PERATURAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PMK.05/2012
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN
ANGGARAN 2012 DENGAN SUMBER DANA
DARI SISA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN
ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.ee/ff/2012 (1)
RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)
Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)

Kode	Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	B E L A N J A					JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX (7)	XX (8)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
		999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
		999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
		999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
		999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
XXXXXX (9)	XX (10)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	XX.XX (13)	
XXXXXX (11)	XX (12)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	XXX (18)	XXXXXXX (19)
XXXXXX (14)	XX (15)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
XX (16)	XX (17)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		
				(21)					
				(22)					
	JUMLAH	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (23)
AN MENTERI..... (24)
..... (25)

..... (26)
NIP..... (27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CARA PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012 berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan sumber dana dengan cara pengisian sebagai berikut:

No.	Uraian Isian
[1]	Diisi dengan Nomor SP DIPA
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
[6]	Diisi dengan kode kewenangan dan uraian kewenangan
[7]	Diisi dengan kode satker
[8]	Diisi dengan uraian satker
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
[10]	Diisi dengan uraian program
[11]	Diisi dengan kode kegiatan
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan
[13]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota
[14]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode output
[15]	Diisi dengan uraian output
[16]	Diisi dengan kode sumber dana
[17]	Diisi dengan uraian sumber dana
[18]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
[19]	Diisi dengan cara penarikan (PL,RK,LC,PP)
[20]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN
[21]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[22]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[23]	Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
[24]	Diisi uraian kementerian
[25]	Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

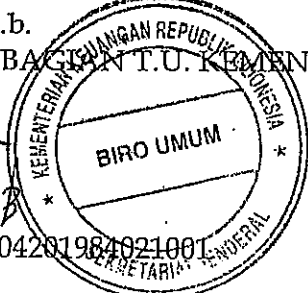
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKOSURTUKAL T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT (1)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)
NIP : (3)
Jabatan : Kuasa PA Satuan Kerja (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN (5), terdapat sisa dana Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor(6) Satuan Kerja (7) sebesar Rp.....(8);
2. Berdasarkan sisa dana tersebut pada angka 1 di atas, diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.(9);
3. Sisa dana sebesar Rp.....(10) tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 karena(11).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(12),.....(13)
KPA Satuan Kerja..... (14)

(tanda tangan)

..... (15)
NIP. (16)

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

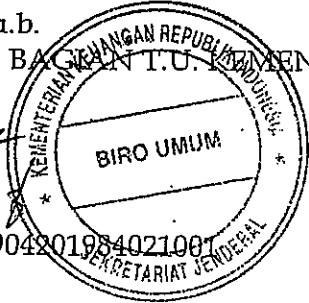
No.	Uraian Isian
(1)	Sesuai kop surat Satuan Kerja yang bersangkutan
(2)	Diisi nama pejabat penandatanganan surat
(3)	Diisi NIP pejabat penandatanganan surat
(4)	Diisi nama Satuan Kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pembayar
(6)	Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011
(7)	Diisi nama Satuan Kerja
(8)	Diisi nilai uang sisa dana (yang belum direalisasikan) berdasarkan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(9)	Diisi nilai uang sisa dana yang akan diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011
(10)	Diisi nilai uang sisa dana yang tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran [(8) – (9)]
(11)	Diisi alasan tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011
(12)	Diisi lokasi/tempat penanda tanganan surat
(13)	Diisi tanggal bulan dan tahun penanda tanganan surat
(14)	Diisi nama Satuan Kerja
(15)	Diisi nama penanggung jawab surat
(16)	Diisi nama NIP penanggung jawab surat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKOR T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PMK.05/2012
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN
ANGGARAN 2012 DENGAN SUMBER DANA DARI
SISA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN
ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.ee/ff/2012 (1)

A. Dasar :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

- Kementerian Negara/ Lembaga : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
- Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
- Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
- Kode>Nama Sakler : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (*****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (6)

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

XX XX (7)
XX.XX XX (8)

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

XXX.XX.XX XX (9)
XXXX XX (10)

C. Sumber Dana Berasal :

- Rupiah Murni
- PNBP
- PNBP TA Berjalan

- Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 April 2012.

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	999.999.999.999	(17)
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	999.999.999.999	(18)
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	999.999.999.999	(19)
5. Hibah Luar Negeri	Rp.	999.999.999.999	(20)
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	999.999.999.999	
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	999.999.999.999	

Rp. 999.999.999.999 (11)
Rp. 999.999.999.999

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (24)

A.N. MENTERI KEUANGAN RI
KEPALA KANWIL DJEN PEN PROVINSI XXXXXXXXXXXXXXXX (25)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (26)

NIP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012. Cara pengisian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Uraian Isian										
[1]	Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut: <table><tr><td>aaaa</td><td>Nomor SP</td></tr><tr><td>bbb-cc</td><td>kode Kementerian Negara/Lembaga - kode Unit Organisasi</td></tr><tr><td>d</td><td>kode kewenangan (1=KP; 2=KD; 3=DK; 4 =TP; 5=UB; 6=DS)</td></tr><tr><td>ee</td><td>Jenis DIPA (20= Lanjutan)</td></tr><tr><td>ff</td><td>Diisi dengan kode pengesahan DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (01 dst=Kanwil DJPBN).</td></tr></table>	aaaa	Nomor SP	bbb-cc	kode Kementerian Negara/Lembaga - kode Unit Organisasi	d	kode kewenangan (1=KP; 2=KD; 3=DK; 4 =TP; 5=UB; 6=DS)	ee	Jenis DIPA (20= Lanjutan)	ff	Diisi dengan kode pengesahan DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (01 dst=Kanwil DJPBN).
aaaa	Nomor SP										
bbb-cc	kode Kementerian Negara/Lembaga - kode Unit Organisasi										
d	kode kewenangan (1=KP; 2=KD; 3=DK; 4 =TP; 5=UB; 6=DS)										
ee	Jenis DIPA (20= Lanjutan)										
ff	Diisi dengan kode pengesahan DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (01 dst=Kanwil DJPBN).										
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga										
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi										
[4]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi										
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian nama satker										
[6]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf										
[7]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi										
[8]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi										
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program										
[10]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan										
[11]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan										
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM)										
[13]	Diisi dengan jumlah Total pagu PNBPN (Tidak perlu diisi)										
[14]	Diisi dengan jumlah pagu PNBPN (Tidak perlu diisi)										
[15]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri										
[16]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri										
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri										
[18]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri										
[19]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung										
[20]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung										
[21]	Diisi dengan nama KPPN										
[22]	Diisi dengan kode KPPN										
[23]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.										
[24]	Diisi tempat dan tanggal penetapan Surat Pengesahan DIPA										
[25]	Diisi dengan nama Kanwil DJPBN										
[26]	Diisi dengan nama penandatangan SP DIPA										
[27]	Diisi dengan NIP penandatangan SP DIPA										

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAKOSAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMETAAN STRUKTUR ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2012
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORGANISASI : (010.05) DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
010.05.13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1245	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
1245.03	Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan
014	Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya

MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2012)		
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	KET.
010.05.13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Prog.
1245	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	Keg.
1245.003	Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan	Output
014	Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat	Komp.
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	Akun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (033.05) DITJEN CIPTA KARYA

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
2412.08	Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)
011	Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
2412.09	Infrastruktur Perdesaan (PIIP)
011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
2413	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
2413.07	Keswadayaan Masyarakat
011	Bantuan Langsung Masyarakat
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya

MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2012)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	KET.
033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Prog.
2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Keg.
2412.008	Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)	Output
011	Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Komp.
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	Akun
2412.009	Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	Output
011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Komp.
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	Akun
2413	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	Keg.
2413.007	Keswadayaan Masyarakat	Output
011	Bantuan Langsung Masyarakat	Komp.
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	Akun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (067) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
UNIT ORGANISASI : (067.01) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)			MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2012)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL		KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	
067.01.06	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		067.01.06	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	
3288	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik		3288	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	
3288.01	Fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks <i>good governance</i>		3288.001	Fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks <i>good governance</i>	
016	Bantuan Langsung Masyarakat Daerah Tertinggal		016	Bantuan Langsung Masyarakat Daerah Tertinggal	
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya		573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	

Catatan :

1. Indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Program TA 2012;
2. Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan TA 2012;
3. Volume Output disesuaikan dengan banyaknya kuantitas Output yang dilanjutkan;
4. Untuk Sub Output dan Sub Komponen tidak harus ada (Opsional);
5. Detil belanja disesuaikan dengan detil belanja yang dilanjutkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKOSURTANAL

KEPALA AGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP. 195904281984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

